

Menelusuri Sejarah Islam di Pakistan: Eksplorasi Ide Pembaharuan Muhammad Ali Jinnah

Yusawinur Barella¹, Umi Nur Kholifatun², Hasaruddin³, Syamzan Syukur⁴

¹ Universitas Tanjungpura, Indonesia; yusawinurbarella@untan.ac.id

² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Bulukumba, Indonesia; uminur2076@gmail.com

³ UIN Alauddin Makassar, Indonesia; hasaruddin@uin-alauddin.ac.id

⁴ UIN Alauddin Makassar, Indonesia; zansyukur@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Islam;
Muhammad Ali
Jinnah;
Pakistan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejarah Islam di Pakistan dan mengkaji ide-ide reformasi yang diusung Muhammad Ali Jinnah. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengkaji visi Muhammad Ali Jinnah tentang negara Islam modern, serta gagasan reformasi sosial, politik, dan budaya yang dianutnya. Peneliti menganalisis dampak ide-ide tersebut terhadap perkembangan Pakistan sebagai negara Islam. Metode penelitian yang digunakan meliputi tinjauan pustaka, pemetaan sejarah, analisis dokumen, dan interpretasi data. Investigasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah Islam di Pakistan dan kontribusi Muhammad Ali Jinnah terhadap modernisasi dan reformasi di negara tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan peran besar dari Muhammad Ali Jinnah dalam sejarah Islam di Pakistan, dan memberikan relevansi dan implementasi gagasan reformasi dalam membentuk identitas bangsa. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tokoh dan peristiwa berpengaruh dalam sejarah dan perkembangan Islam di Pakistan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Korespondensi:

Yusawinur Barella

Universitas Tanjungpura, Indonesia; yusawinurbarella@untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pakistan adalah sebuah negara berdaulat di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di sebelah timur, Afganistan dan Iran di sebelah barat, China di sebelah utara, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 796.095 kilometer persegi dan populasinya mencapai sekitar 220 juta jiwa. Islamabad adalah ibu kota Pakistan dan Karachi adalah kota terbesarnya. Penduduk Pakistan memiliki keanekaragaman budaya dan agama, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selain itu, negara ini memiliki sejarah yang kaya dan penting, meliputi kekuasaan Kekaisaran Mughal dan gerakan perjuangan untuk kemerdekaan dari kolonialisme Inggris. Pakistan juga dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti masalah kemiskinan, konflik regional, dan terorisme. Namun, negara ini tetap menjadi kekuatan penting di kawasan Asia Selatan dan memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang ke depannya.

Negara Pakistan terbentuk pada tahun 1947 setelah pemisahan India menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan (Haq & Hasaruddin, 2022). Pembentukan negara Pakistan didasarkan pada dasar pemikiran bahwa umat Muslim di India perlu memiliki negara mereka sendiri untuk memajukan

kepentingan mereka. Ide untuk terbentuknya negara Pakistan telah dicetuskan oleh aktivis Muslim terkemuka seperti Muhammad Iqbal (Alhaddad, 2022; Hasan, 2021), yang mendorong terbentuknya negara dalam sebuah pidato bersejarah pada tahun 1930 (Mohomed, 2014). Setelah perjuangan panjang dan berliku, akhirnya pada 14 Agustus 1947, negara Pakistan secara resmi dibentuk dan naik ke panggung dunia sebagai negara merdeka (Nursyamsi et al., 2022). Pembentukan negara Pakistan bukanlah proses yang mudah karena terdapat banyak konflik politik dan sosial antara umat Muslim dan Hindu di India, yang berujung pada terjadinya kekerasan besar-besaran dan bermigrasi massal (Haq & Hasaruddin, 2022). Meskipun demikian, pembentukan negara Pakistan berhasil membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Muslim di India, yang merasa memiliki identitas nasional dan politik mereka sendiri. Saat ini, Pakistan adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia (Philippon, 2021). Sebagai negara Islam, Pakistan merupakan tempat yang penting dalam sejarah perkembangan Islam di dunia serta untuk pemikiran pembaruan dalam Islam. Di Pakistan, Islam menjadi faktor penting dalam politik, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sejarah Islam di Pakistan telah memberikan landasan kuat untuk perkembangan agama ini di negara ini. Salah satu tokoh penting yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk negara dan pemikiran Islam di Pakistan adalah Muhammad Ali Jinnah, pendiri Pakistan yang juga dikenal sebagai "bapak bangsa" Pakistan (Wulandari, 2021). Mohammad Ali Jinnah, yang lebih dikenal sebagai *Quaid-e-Azam* (pemimpin besar) (Naveed & Ali, 2022) adalah seorang politisi dan negarawan Pakistan yang berperan dalam memimpin negara tersebut menuju kemerdekaannya dari India Britania pada tahun 1947.

Muhammad Ali Jinnah memimpin gerakan kemerdekaan Pakistan dari penjajahan Inggris dan berhasil menjadikan negara tersebut sebagai negara Islam modern pada tahun 1947 (Hamka, 2016). Selain itu, Muhammad Ali Jinnah juga dikenal karena pandangannya terhadap pembaharuan Islam, di mana dia mengadvokasi ide-ide modernisasi dan reformasi dalam agama Islam dan memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran Islam di Pakistan (Inayati et al., 2022).

Artikel ini hendak menjelajahi sejarah Islam di Pakistan dan mengeksplorasi ide-ide yang diusung oleh Muhammad Ali Jinnah dalam pembaharuan Islam di negara tersebut dan membahas dampak pemikiran beliau terhadap sejarah Islam di Pakistan dan masyarakat pada umumnya. Artikel ini akan menggunakan berbagai sumber seperti studi literatur, dan interpretasi data untuk menganalisis pandangan dan peran Muhammad Ali Jinnah dalam pembentukan negara Islam modern di Pakistan. Artikel ini sangat penting untuk memahami ideologi Muhammad Ali Jinnah, yang sampai saat ini masih mempengaruhi berbagai kebijakan nasional dan regional di Pakistan dalam hubungannya dengan Islam, karena dapat memberikan perspektif baru tentang sejarah Islam di negara ini dan relevansi pembaharuan keagamaan terhadap pembentukan negara dan masyarakat modern di masa kini.

2. METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari studi literatur, analisis dokumen, hingga interpretasi data dari berbagai sumber. Tahap awal penelitian adalah melakukan penelusuran sejarah dan bibliografi terkait sejarah Islam di Pakistan dan pandangan Muhammad Ali Jinnah tentang pembaharuan Islam serta implementasinya di negara tersebut. Selanjutnya, tahap analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen sumber yang terdiri dari kutipan tulisan Muhammad Ali Jinnah terkait pemikirannya tentang pembaharuan

Islam, arsip sejarah yang terkait dengan gerakan kemerdekaan dan pembentukan negara Pakistan, serta dokumen terkait dengan perkembangan sejarah Islam di Pakistan. Tahap terakhir adalah interpretasi data yang akan dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan data yang terkumpul serta menginterpretasikan data yang relevan terhadap tujuan penelitian. Hasil penelitian akan dirangkum dan dianalisis dengan menggunakan pengolahan data kualitatif. Dalam melakukan analisis, peneliti akan menggunakan Metode Analisis Kritis berdasarkan kerangka analisis teori pemikiran Muhammad Ali Jinnah tentang pembaharuan Islam dan wawasan sejarah Islam di Pakistan, dan masyarakat di Pakistan hingga kini.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Sejarah Islam di Pakistan

Asal mula terbentuknya negara Pakistan sangat terkait dengan sejarah umat Muslim di India, yang juga didominasi oleh umat Hindu. Umat Muslim terus tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi, membentuk komunitas Muslim di India. Di wilayah India sendiri, terdapat dua kelompok agama yang besar, yaitu Hindu dan Islam. Islam pertama kali muncul di Pakistan sekitar 12 abad sebelum negara ini meraih kemerdekaannya dari Inggris. Sejarah Islam di Pakistan berakar dalam kedatangan agama Islam ke wilayah India selama abad ke-7 Masehi melalui penaklukan Muslim Arab. Pada waktu itu, wilayah India saat ini menjadi bagian Kerajaan Arab dan kemudian diambil alih oleh Kekhalifahan Islam. Penyebaran agama Islam terus berlanjut selama periode ini melalui upaya para misionaris Muslim. Penyebaran agama Islam di wilayah India berlangsung secara bertahap melalui para pedagang, penjelajah, dan ulama yang memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk setempat (Zawawi, 2022). Kedatangan Islam di dapat ditelusuri ke kampanye militer yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, Gubernur Iraq, pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada awal abad ke-8. Seorang komandan muda berusia 17 tahun bernama Muhammad bin Qasim dikirim oleh Hajjaj bin Yusuf untuk menaklukkan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Pakistan (Zawawi, 2022). Muhammad bin Qasim berhasil membawa wilayah Sind di bawah kekuasaan Muslim, yang menandai masuknya Islam ke bagian tersebut dari anak benua India (Kumar, 2017). Pada abad ke-10, Kekaisaran Ghaznavid dan kemudian Kekaisaran Ghurid telah memperoleh kekuasaan di wilayah ini (Anooshahr, 2021; Eaton, 2021), memperkuat pengaruh agama Islam. Dalam periode selanjutnya, sekitar abad ke-12, Kekaisaran Mughal tumbuh menjadi kekuatan yang dominan di wilayah ini (Asriyah, 2017). Pendiri Kekaisaran Mughal, Babur, adalah seorang Muslim dan membawa agama Islam sebagai agama utama dalam kekaisaran tersebut. Selama pemerintahan Muslim oleh berbagai dinasti diatas, seperti Ghaznavid, Ghurid, dan Mughal, Islam terus menyebar dan menjadi sangat akar dalam wilayah tersebut.

Pada abad ke-18, wilayah yang sekarang menjadi Pakistan menjadi bagian dari Kekaisaran Sikh (Isra Sarwar et al., 2022). Namun, setelah Perang Anglo-Sikh pada tahun 1849, wilayah ini menjadi bagian dari India Britania. Selama periode kolonial, Islam terus berkembang di wilayah ini dengan dukungan dari para pemimpin Muslim dan organisasi Islam yang aktif, seperti All India Muslim League yang didirikan pada tahun 1906 (Qulkarni, 2019). Selama perjuangan kemerdekaan India, terbentuklah gerakan untuk menuntut kemerdekaan bagi Muslim India, yang kemudian memunculkan tuntutan bagi pembentukan negara yang mandiri bagi Muslim, yang dikenal sebagai negara Pakistan. Para penguasa Muslim dan pemerintahan mereka berperan penting dalam mempromosikan dan menegakkan Islam sebagai agama dominan di wilayah yang sekarang Pakistan.

Setelah India merdeka dari Inggris pada tahun 1947, wilayah tersebut dibagi menjadi dua bagian yang kemudian masing-masing menjadi negara berdaulat, yaitu India dan Pakistan (Akhter, 2016; Jauhari, 2012). Bagian barat dan timur Pakistan saat itu terdiri dari mayoritas penduduk Muslim, sementara India mayoritas penduduknya Hindu.

Terdapat sedikitnya tiga faktor utama yang menjadi penyebab terbentuknya negara Pakistan. Faktor-faktor tersebut meliputi: Agama dan Budaya; Ekonomi, dan Politik. Secara keseluruhan, akar masalah ini menjadikan pemisahan sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi ketegangan dan konflik yang muncul di antara kedua negara tersebut.

a. Faktor agama dan budaya

Faktor Agama dan Budaya memiliki peran penting dalam lahirnya Pakistan. Masyarakat Muslim dan Hindu memiliki dasar yang berbeda dalam hal hukum, filosofi, budaya, dan struktur sosial. Selama berabad-abad, perbedaan ini menciptakan perpecahan antara komunitas Muslim dan Hindu di India. Umat Muslim di India mencari cara untuk menjaga identitas dan kepercayaan mereka sendiri. Pemikiran dan ajaran Islam juga memainkan peran penting dalam memperkuat perjuangan separatis yang menghasilkan pembentukan negara Pakistan. Keberagaman agama dan budaya di India yang mencakup dua kelompok agama yang besar, yaitu Hindu dan Islam, menciptakan ketegangan dan konflik antara komunitas Muslim dan Hindu. Ketegangan keagamaan ini diperburuk oleh masalah wilayah Kashmir (Ayunda & Aria, 2017), yang mayoritas penduduknya Muslim namun dipimpin oleh seorang Maharaja Hindu yang memilih bergabung dengan India. Perbedaan dalam praktik agama dan tradisi budaya menjadi faktor yang menyebabkan anggota masing-masing komunitas ingin mendirikan negara yang mewakili kepentingan dan kepercayaan mereka.

b. Faktor ekonomi

Terdapat beberapa faktor ekonomi yang berkontribusi pada pemisahan India dan Pakistan. Salah satu faktor ekonomi yang menjadi alasan Pakistan ingin berpisah dari India adalah diskriminasi dan marginalisasi umat Muslim di India (Sahgal, Neha et al., 2021) dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya ekonomi antara provinsi-provinsi di India. Selama periode sebelum pembagian India pada tahun 1947, wilayah Pakistan berkontribusi dengan sebagian besar pendapatan negara, tetapi keuntungan tersebut digunakan untuk membangun daerah-daerah lain di India. Hal ini menyebabkan ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk Pakistan dan pemimpin politiknya terhadap pemerintah India, yang dinilai tidak adil dan merugikan daerah mereka. Selain itu, ada ketidaksetaraan dalam pembagian sumber daya alam, terutama air. Sungai Indus yang menjadi sumber utama air di wilayah Pakistan juga melintasi India, sehingga India memiliki kendali penuh atas penggunaan air tersebut. Hal ini merupakan sumber ketegangan antara kedua negara dan menjadi salah satu alasan kelompok pemimpin politik Pakistan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah berupaya untuk memisahkan diri dari India dalam sebuah negara yang berciri khas Islam.

c. Faktor politik

Faktor-faktor politik yang menyebabkan Pakistan ingin berpisah dari India meliputi kebijakan "membagi dan menguasai" yang diterapkan oleh penjajah Inggris dan kekhawatiran pemimpin Muslim tentang dominasi pemerintahan Hindu di India (Phillips, 2023). Minoritas Muslim di India merasa bahwa hak-hak dan kepentingan mereka tidak terwakili dengan baik, sehingga menuntut adanya negara yang terpisah untuk kaum Muslim (Briskey, 2022).

Konflik atas wilayah yang diperebutkan, yaitu Kashmir (Ayunda & Aria, 2017), juga memainkan peran penting dalam perpecahan ini. India dan Pakistan telah terlibat dalam beberapa pertempuran mengenai Kashmir, yang menjadi titik sengketa besar antara kedua negara. Pandit Jawaharlal Nehru,

Lord Louis Mountbatten, dan Muhammad Ali Jinnah merupakan tokoh penting yang terlibat dalam negosiasi dan diskusi yang mengarah pada pembagian India dan pembuatan Pakistan (Lautemann, 2009).

3.2. Eksplorasi Ide Pembaharuan Muhammad Ali Jinnah

a. Latar Belakang Muhammad Ali Jinnah

Mohammad Ali Jinnah lahir pada tanggal 25 Desember 1876 di Karachi (Team, 2015), Pakistan, ketika wilayah itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Britania. Masa remaja Muhammad Ali Jinnah ditandai dengan banyak perubahan dalam hidupnya. Setelah kematian ibunya ketika dia berusia sepuluh tahun, ayahnya mengirimnya ke Inggris untuk mengejar pendidikan yang lebih baik. Di sana, beliau belajar di Sindh Madrasatul Islam di Karachi dan kemudian pindah ke Inggris pada usia 16 tahun untuk melanjutkan pendidikan di London dan mengikuti profesi hukum (Phillips, 2023). Saat di London, Muhammad Ali Jinnah mempertahankan gaya hidup Barat, mengenakan setelan jas dan bermain kriket. Namun, ia juga mengasah identitasnya sebagai seorang Muslim dan terlibat aktif dalam organisasi Muslim di London, termasuk Liga Muslimin India. Setelah menyelesaikan studinya, Muhammad Ali Jinnah kembali ke India dan mendirikan firma hukumnya sendiri di Bombay (Phillips, 2023). Di sana, ia mulai dipengaruhi oleh tokoh-tokoh lain di kalangan Muslim India, dan memperkuat pandangannya bahwa musyawarah dan kesepakatan dengan Inggris jauh lebih baik daripada memperjuangkan kemerdekaan India melalui demonstrasi kekerasan atau gerakan yang radikal.

Muhammad Ali Jinnah menjadi tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan India dan memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan Pakistan. Ia merupakan pemimpin Liga Muslim sejak tahun 1913 (Sulaiman, 2022) hingga terbentuknya Pakistan pada tanggal 14 Agustus 1947 dan kemudian menjabat sebagai Gubernur-Jendral pertama negara tersebut hingga wafatnya. Posisi Muhammad Ali Jinnah di dalam Liga Muslim sangat penting dalam proses terbentuknya Pakistan, yang bertujuan untuk menciptakan negara yang terpisah dari India dan berpenduduk mayoritas Muslim. Muhammad Ali Jinnah berpendapat bahwa umat Islam adalah sebuah bangsa yang terpisah dari umat Hindu dan agama-agama lainnya di India, dan mereka membutuhkan negara mereka sendiri dengan mayoritas Muslim. Muhammad Ali Jinnah memainkan peran penting dalam perundingan dengan Inggris dan Kongres Nasional India untuk pembentukan Pakistan. Resolusi Lahore tahun 1940 yang menuntun terbentuknya negara terpisah untuk Muslim di India (Zia, 2022), disahkan di bawah kepemimpinannya.

b. Pemahaman tentang Muslim di India

Mohammad Ali Jinnah, pendiri Pakistan, memiliki pandangan yang kuat tentang identitas politik dan kebudayaan unik Muslim di India. Menurut Muhammad Ali Jinnah, umat Islam di India memiliki identitas budaya yang berbeda dari mayoritas Hindu dan komunitas lainnya (Wazir, 2021). Beliau berpendapat bahwa perbedaan etnis, agama, dan budaya antara umat Islam dan kelompok mayoritas membedakan mereka sebagai dua kelompok etnis yang berbeda, dan karena itu, umat Islam membutuhkan negara mereka sendiri di wilayah India (Al Mujahid, 1996). Muhammad Ali Jinnah juga menegaskan bahwa status minoritas umat Islam di India telah dirusak oleh sistem pemerintahan pusat dan strategi politik tangan di belakang layar yang didukung oleh kelompok mayoritas (Hussain, 2015). Oleh karena itu, Mohammad Ali Jinnah menyatakan bahwa pembentukan negara Pakistan di wilayah India adalah satu-satunya cara untuk memastikan kebebasan dan hak-hak politik dan budaya umat Islam (Ischak, 2019). Dalam sebuah pidato penting diubah pada tahun 1940, Mohammad Ali Jinnah

menekankan pentingnya pengakuan dari identitas Muslim yang unik sebagai kelompok etnis di India. Ia menyatakan, "kita bukan sekadar partai politik dalam arti biasa dari kata itu...kami mewakili ataukah berjuang untuk suatu identitas politik yang unik"(Hussain, 2015).

Muslim di India menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi sebelum tahun 1947. Muslim sering kali dikecualikan dari posisi pemerintahan tingkat tinggi, kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Muslim juga dihadapkan pada diskriminasi dalam hal kepemilikan tanah dan akses ke kredit. Penjajah Inggris di India menerapkan kebijakan "membagi dan menguasai", memprovokasi perselisihan antara Hindu dan Muslim, dan berkontribusi pada ketegangan komunal. Inggris menggunakan ketegangan komunal ini untuk menjaga kekuasaannya dan tidak cukup mengambil tindakan untuk mengatasi diskriminasi terhadap Muslim. Diskriminasi ini memicu tuntutan akan negara Muslim yang terpisah (Priatna, 2017), yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan Pakistan pada tahun 1947. Selain itu, sistem kasta Hindu yang umum diterapkan di India menimbulkan lapisan diskriminasi lain pada Muslim yang dianggap sebagai kasta rendah oleh mayoritas masyarakat, sehingga menyebabkan pengecualian sosial, perlakuan sistematis yang buruk, dan kesempatan yang terbatas.

3.3. Pembaharuan Konstitusional:

Muhammad Ali Jinnah adalah pemimpin politik utama di India yang memperjuangkan hak-hak Muslim dan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bagi mereka. Usulan Jinnah mengenai kerangka konstitusional yang menghormati hak-hak Muslim terutama diwujudkan dalam konsep "Pakatan Negara Dua" atau "Two-Nation Theory" (Şahbaz, 2020). Menurutnya, Hindu dan Muslim adalah dua bangsa yang berbeda di India, dan mereka membutuhkan ruang politik yang terpisah untuk mempertahankan identitas agama dan kebudayaan mereka. Muhammad Ali Jinnah menekankan perlunya menciptakan sebuah negara baru yang diberi nama Pakistan, di mana Muslim dapat hidup bebas dan merdeka dalam sebuah konstitusi yang mengakui hak-hak mereka. Dalam usulan-usulannya, Muhammad Ali Jinnah menginginkan adanya perlindungan hak-hak minoritas Muslim dalam konstitusi Pakistan, termasuk hak-hak politik, kebebasan beragama (Zamzami, 2023), dan kemajuan ekonomi (Jan, 2022). Beliau juga merekomendasikan undang-undang yang memperbolehkan wanita mendapat hak-hak seperti hak bersuara, kebebasan bergerak, dan untuk bekerja di tempat-tempat umum (Jan, 2022). Muhammad Ali Jinnah ingin memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi Muslim diakui dan dihormati dalam kerangka konstitusional negara baru. Usulan Jinnah ini mencerminkan kepedulian dan perjuangan yang luas untuk memastikan eksistensi serta kebebasan Muslim di India. Kerangka konstitusional yang diusulkan oleh Jinnah membantu menyelaraskan kepentingan Muslim dalam rangka menghormati identitas agama dan budaya mereka dalam kerangka negara yang baru terbentuk.

Dalam pidatonya pada pertemuan Majelis Konstituen Pakistan pada 11 Agustus 1947 (Paracha, 2015), Muhammad Ali Jinnah menyatakan bahwa mereka ingin Pakistan menjadi negara Muslim yang dihormati dan diakui karena nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada hati nurani pribadi warga negaranya.

Muhammad Ali Jinnah dengan tegas percaya pada prinsip kebebasan beragama, di mana setiap individu memiliki hak untuk beribadah sesuai agamanya tanpa diskriminasi atau paksaan. Ia menekankan bahwa setiap warga negara, terlepas dari kepercayaan agama mereka, harus dapat menikmati hak-hak dan kebebasan mereka dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif. Selain itu, Muhammad Ali Jinnah adalah pendukung kuat perlindungan hak minoritas. Ia menyadari bahwa

pembentukan sistem politik yang adil dan berkeadilan memerlukan perlindungan hak-hak minoritas untuk memastikan partisipasi dan representasi mereka yang sama dalam pemerintahan negara. Beliau percaya bahwa masyarakat yang demokratis harus memberikan kesempatan dan perlindungan yang sama kepada semua warganya, tanpa mempedulikan latar belakang agama atau etnis mereka.

3.4. Pembaharuan Politik

Muhammad Ali Jinnah memimpin upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan di negaranya (Aisyah, 2014). Dia mengakui pentingnya demokrasi dalam membangun satu bangsa yang kokoh dan percaya bahwa rakyat Pakistan harus memiliki kekuatan untuk memilih pemerintah yang melayani mereka dan mengelola negara yang adil dan baik. Jinnah memimpin penyusunan konstitusi baru Pakistan, yang menetapkan landasan bagi sistem pemerintahan demokratis yang transparan. Sebuah Majelis Konstitusi dibentuk untuk membuat dokumen ini, yang ditulis pada tahun 1956. Konstitusi Pakistan menetapkan sistem pemerintahan federal dan parlementer, di mana rakyat Pakistan memilih anggota parlemen dalam pemilu yang diadakan setiap lima tahun untuk mewakili mereka di Majelis Rakyat (Dewan Rakyat). Selain itu, Muhammad Ali Jinnah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan dan memerintahkan penyediaan laporan transparan tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Dia juga mengawasi pembentukan Dewan Pengawas, yang bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap pengeluaran pemerintah dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien.

Terdapat beberapa catatan yang menjelaskan bahwa Muhammad Ali Jinnah mempromosikan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sebagai pilar penting dalam pembangunan negara, terutama setelah pembentukan Pakistan. Menurut pemahaman Muhammad Ali Jinnah, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia fundamental, dan sikap terbuka terhadap pandangan, gagasan, dan kritik mutlak diperlukan untuk mencapai kemajuan dalam setiap negara. Jinnah mengakui pentingnya pers yang bebas dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat dikritik dengan terbuka. Dia juga menggarisbawahi bahwa kebebasan berpendapat harus diberikan kepada semua orang, tanpa pandang bulu, dan bahkan kepada mereka yang berpendapat berbeda dengan pemerintah.

3.5. Pembaharuan Sosial

- a. Mengupayakan pemberantasan diskriminasi dan penindasan, baik dalam masyarakat maupun sistem hukum

Muhammad Ali Jinnah telah berperan penting dalam memperjuangkan pemberantasan diskriminasi dan penindasan baik dalam masyarakat maupun sistem hukum. Muhammad Ali Jinnah berjuang untuk hak-hak umat Muslim di India yang dikuasai oleh Inggris dan bekerja untuk terbentuknya negara yang terpisah bagi umat Muslim, yang kemudian menjadi Pakistan. Beliau adalah seorang pembela yang gigih untuk hak-hak minoritas dan kebebasan beragama. Beliau percaya pada masyarakat di mana semua individu, tanpa memandang agama mereka, memiliki hak dan kesempatan yang setara. Sebagai pemimpin Liga Muslim India, beliau juga memperjuangkan hak-hak umat Muslim yang menghadapi diskriminasi dan penindasan di India yang dikuasai Inggris. Muhammad Ali Jinnah meyakini bahwa komunitas Muslim layak mendapatkan representasi yang setara dan berjuang untuk memperoleh hak-hak mereka di bidang politik. Selain perjuangannya untuk hak-hak minoritas, Muhammad Ali Jinnah juga menekankan pentingnya sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Beliau mendorong pendirian kekuasaan yudikatif yang independen yang akan menegakkan prinsip-prinsip

keadilan dan kesetaraan. Muhammad Ali Jinnah meyakini bahwa kerangka hukum yang kuat diperlukan untuk melindungi hak-hak individu dan mendorong masyarakat yang adil.

b. Mendorong perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi semua warga Pakistan

Sebagai Gubernur Jenderal pertama Pakistan, beliau menekankan pentingnya pendidikan dan bekerja untuk mendirikan institusi pendidikan di seluruh negara. Jinnah menyadari bahwa pendidikan sangat penting bagi perkembangan Pakistan, dan ia mempromosikan pembentukan universitas, seperti Universitas Punjab dan Universitas Dhaka, untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada rakyat Pakistan. Selain pendidikan, Jinnah juga menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Pakistan. Beliau bekerja keras untuk mendirikan fasilitas kesehatan dan program kesejahteraan sosial di seluruh negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Muhammad Ali Jinnah membayangkan sebuah negara di mana semua warga Pakistan memiliki akses ke kebutuhan dasar dan layanan kesehatan, tanpa memandang status sosial-ekonomi mereka.

c. Menekankan pentingnya kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat

Jinnah menekankan perlunya pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan dan memperbaiki standar hidup bagi rakyat Pakistan. Beliau memahami bahwa kemajuan ekonomi dapat memberikan kesempatan kerja, meningkatkan tingkat pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Dengan pendekatan yang terfokus pada pembangunan ekonomi, Muhammad Ali Jinnah bertujuan untuk menciptakan sebuah negara yang makmur yang dapat mendukung warganya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Selain itu, Muhammad Ali Jinnah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur adalah hal yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Beliau memahami bahwa sistem infrastruktur yang terkoneksi dan efisien, termasuk jaringan transportasi, fasilitas komunikasi, dan utilitas publik, dapat mendorong kegiatan ekonomi, menarik investasi, dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Jinnah memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi, karena beliau menganggap hal ini sangat penting untuk kemajuan ekonomi dan integrasi nasional. Melalui visi dan penekanan beliau terhadap kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, Jinnah bertujuan untuk menciptakan sebuah negara di mana rakyat Pakistan dapat hidup lebih baik, dengan meningkatkan peluang, akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, dan peningkatan standar hidup.

3.6. Visi Pembentukan Negara Pakistan

Terdapat tiga visi yang dilakukan oleh Muhammad Ali Jinnah dalam pembentukan negara Pakistan, yaitu :

a. Mengadvokasi untuk hak-hak Muslim di India untuk mendapatkan negara merdeka.

Muhammad Ali Jinnah memiliki peran yang krusial dalam pembentukan Negara Pakistan sebagai wadah bagi umat Muslim di India. Sebagai pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan, Mohammad Ali Jinnah mengadvokasi dengan gigih untuk hak-hak kaum Muslim dalam mencapai kemerdekaan dan memiliki negara merdeka yang memadai untuk menghubungkan mereka (Jan, 2022). Melalui pandangannya yang kuat, Mohammad Ali Jinnah menekankan bahwa Muslim di India memiliki identitas politik dan kebudayaan yang unik yang perlu dihormati dan diperjuangkan. Dalam dorongan untuk mencapai tujuan ini, Mohammad Ali Jinnah membentuk gerakan politik yang menghimpun dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Muslim dan berhasil mengartikulasikan klaim-klaim mereka. Upaya dan perjuangannya dalam menggalang kesadaran akan hak-hak kaum

Muslim menjadi landasan bagi pembentukan Negara Pakistan yang berdiri pada tahun 1947. Keberhasilan Mohammad Ali Jinnah dalam mengadvokasi hak-hak Muslim di India membantu mengubah wacana politik di subbenua tersebut dan menginspirasi penganut Islam untuk mencari identitas dan kebebasan politik mereka sendiri.

b. Merupakan pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan.

Muhammad Ali Jinnah merupakan pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Beliau memainkan peran sentral dalam membangun kesadaran publik tentang hak-hak komunitas Muslim di India untuk memiliki negara terpisah yang merdeka. Visi beliau yang khas dan upayanya dalam mengumpulkan dukungan politik dan publik untuk hak-hak komunitas Muslim akhirnya berujung pada pembentukan Pakistan pada tanggal 14 Agustus 1947. Sebagai seorang pengacara dan politisi terkemuka, Jinnah tanpa henti memperjuangkan hak-hak komunitasnya selama beberapa dekade, dan hal ini menjadi dasar terbentuknya Pakistan. Saat ini, Muhammad Ali Jinnah diakui sebagai bapak pendiri Pakistan (Press Release, 2023) dan dihormati atas pengabdianya yang tanpa pamrih dan kontribusinya yang tak ternilai dalam pembentukan Pakistan

c. Mempromosikan gagasan bahwa Muslim di India memiliki identitas politik dan kebudayaan yang unik yang perlu dihormati dan diperjuangkan.

Muhammad Ali Jinnah secara aktif mempromosikan gagasan bahwa Muslim di India memiliki identitas politik dan kebudayaan yang unik yang layak dihormati dan diperjuangkan. Beliau menekankan pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak Muslim, terutama dalam masyarakat yang beragam seperti India (Wulandari, 2021). Muhammad Ali Jinnah percaya bahwa Muslim harus memiliki negara terpisah di mana mereka dapat mengatur diri sendiri dan menjaga kepentingan budaya, sosial, dan agama mereka. Advokasi Mohammad Ali Jinnah terkait identitas Muslim dan pembentukan negara terpisah akhirnya mengarah pada terbentuknya Pakistan. Visinya untuk sebuah negara dengan mayoritas Muslim didasarkan pada keyakinan bahwa Muslim di India membutuhkan kerangka politik yang berbeda untuk mempertahankan identitas mereka dan memastikan representasi yang setara.

Keputusan negara terpisah Pakistan dari India didasarkan pada sejumlah motivasi dan alasan yang kompleks. Selain faktor Politik, ekonomi, agama dan budaya yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu motivasi utama di balik pembentukan Pakistan adalah Teori Dua Bangsa (Two-Nation Theory) (Şahbaz, 2020), yang menyatakan bahwa Hindu dan Muslim di India adalah dua bangsa yang terpisah dan memiliki identitas budaya dan agama yang berbeda. Teori ini menganggap bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak dapat disatukan dalam satu negara yang sama, dan sebagai hasilnya, ada kebutuhan akan tanah air terpisah bagi umat Muslim untuk mempertahankan identitas dan kebebasan agama mereka. Muhammad Ali Jinnah, tokoh utama di balik gerakan Pakistan, dan para pemimpin Muslim lainnya, menekankan perlunya sebuah negara yang memastikan hak-hak minoritas dan kebebasan beragama. Mereka mengkhawatirkan bahwa di India yang mayoritas Hindu, minoritas Muslim akan menghadapi kesulitan dalam menjaga identitas, praktik agama, dan kebijakan politik yang bersifat dominan. Oleh karena itu, mereka menyuarakan cita-cita untuk memastikan perlindungan dan kemandirian bagi umat Muslim di wilayah yang akan menjadi Pakistan.

3.7. Implementasi dan Dampak

Pembentukan Pakistan memiliki konsekuensi yang signifikan bagi India, umat Muslim, dan komunitas lainnya. Bagi India, pemisahan ini mengakibatkan pembagian negara menjadi dua negara terpisah, yaitu India dan Pakistan. Pembagian ini menyebabkan kekerasan dan kerusakan komunal

yang meluas, yang mengakibatkan pengungsian jutaan orang. Pemisahan ini juga menciptakan ketegangan dan konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan, terutama terkait wilayah yang dipersengketakan seperti Jammu dan Kashmir.

Bagi umat Muslim, pembentukan Pakistan memberikan mereka sebuah tanah air terpisah di mana mereka dapat mengamalkan identitas agama dan budaya mereka dengan bebas. Pembentukan Pakistan memenuhi aspirasi banyak umat Muslim yang percaya pada ide adanya negara yang didominasi oleh mayoritas Muslim. Namun, pemisahan ini juga menyebabkan migrasi jutaan orang melintasi batas yang baru saja digariskan, dengan merusak dan kekerasan yang masif.

Pembentukan Pakistan juga memiliki konsekuensi bagi komunitas lain di wilayah tersebut. Pemisahan ini mengakibatkan migrasi komunitas non-Muslim, seperti Hindu dan Sikh, dari Pakistan ke India, serta umat Muslim dari India ke Pakistan (Das, 2020). Migrasi massal ini menyebabkan tegangan komunal dan kekerasan, termasuk serangan terhadap minoritas agama. Selain itu, pembentukan Pakistan juga memiliki dampak sosial-politik dan ekonomi jangka panjang bagi India dan Pakistan. Hal ini membentuk identitas dan narasi nasional dari kedua negara tersebut serta mempengaruhi hubungan mereka satu sama lain dan dengan komunitas internasional yang lebih luas.

3.8. Kritik dan Penerimaan

Ide dan langkah-langkah Muhammad Ali Jinnah dalam memperjuangkan kemerdekaan Pakistan menimbulkan berbagai tanggapan dan reaksi dari masyarakat dan pemimpin politik. Sebagian umat Muslim di India mendukung ide Jinnah tentang kemerdekaan Pakistan sebagai negara yang didominasi oleh mayoritas Muslim. Namun, ada juga yang menentangnya dan mempertahankan gagasan bahwa India harus tetap menjadi satu negara, tidak dibagi menjadi dua. Pada masa itu, beberapa pemimpin politik seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru menyatakan penolakan terhadap pembagian India menjadi dua negara, karena hal ini dianggap akan mengancam persatuan nasional dan kerja sama antara umat beragama di India. Di sisi lain, pihak Inggris sebagai penjajah pada saat itu memandang pembentukan Pakistan sebagai solusi atas masalah kekerasan dan konflik etnis di India, dan dengan demikian mendukung ide tersebut. Setelah pembentukan Pakistan, terdapat pula reaksi dari berbagai negara lain. Beberapa negara mengakui Pakistan sebagai negara merdeka, sementara negara lain memilih untuk tidak mengakui keberadaannya. Reaksi internasional atas pembentukan Pakistan juga berkaitan dengan konflik yang sering terjadi di kemudian hari, terutama tentang wilayah Kashmir dan kebijakan luar negeri terkait dengan India dan negara-negara tetangganya (Ayunda & Aria, 2017).

3.9. Warisan yang Ditinggalkan oleh Muhammad Ali Jinnah

a. Nasionalis dan pemimpin bangsa

Muhammad Ali Jinnah dikenang sebagai "Quaid-e-Azam" atau "Pemimpin Agung" di Pakistan karena perannya yang monumental dalam memimpin gerakan kemerdekaan dan mendirikan negara Pakistan (Shabbir, 2022). Gelar tersebut mencerminkan penghargaan dan pengakuan yang tinggi terhadap kontribusinya yang besar sebagai pemimpin terkemuka dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Sebagai pemimpin Liga Muslim Seluruh India, Jinnah memainkan peran sentral dalam memperjuangkan hak-hak politik dan kepentingan Muslim di India. Ia adalah salah satu arsitek utama pemisahan India dan Pakistan, dan menjadikan visi terwujudnya negara Islam yang merdeka bagi kaum Muslim di Asia Selatan. Muhammad Ali Jinnah dikenang sebagai figur yang memberikan inspirasi dan diteladani dalam pembentukan negara dan dalam mewujudkan visi Pakistan sebagai

sebuah negara yang inklusif, demokratis, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Warisan Jinnah sebagai Quaid-e-Azam masih terus dirayakan dan diperingati di Pakistan melalui peringatan resmi seperti Hari Quaid-e-Azam pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya.

b. Pengaruh ideologis

Ide pembaharuan Muhammad Ali Jinnah dari awal abad ke-20 memiliki dampak yang mendalam pada politik, hukum, dan pembangunan negara di Pakistan. Jinnah, yang merupakan tokoh terkemuka dalam gerakan nasionalis India dan pendiri Pakistan, percaya dalam menciptakan tanah air terpisah bagi umat Islam di Asia Selatan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Ia memvisualisasikan Pakistan sebagai negara sekuler yang menghormati hak semua warganya tanpa memandang agama, kasta, atau etnisitas. Visinya ini berakar pada prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Ide-ide reformasi dan pembangunan negara Jinnah dipengaruhi oleh gagasan Iqbal, seorang filsuf dan penyair Muslim terkemuka, yang mempercayai dalam kebangkitan pemikiran Islam dan pembentukan negara Muslim yang independen di Asia Selatan (Alhaddad, 2022). Advokasi hukum dan aktivisme anti-kolonial Muhammad Ali Jinnah memainkan peran penting dalam pembentukan Pakistan sebagai negara berdaulat, dengan ide-idenya membantu membentuk konstitusi, kerangka hukum, dan institusi politik negara tersebut. Visi dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Muhammad Ali Jinnah seperti demokrasi, toleransi agama, dan kesetaraan masih relevan dan diperjuangkan di Pakistan hingga saat ini. Walaupun tidak selalu berhasil diimplementasikan sepenuhnya, tetapi pemerintah dan aktivis di Pakistan terus berjuang dengan keras untuk membangun negara yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya. Dalam konteks politik Pakistan, nilai-nilai seperti demokrasi dan toleransi agama juga menjadi kunci untuk menjaga toleransi antaragama dan mengurangi konflik di dalam masyarakat.

c. Pemimpin transformasional

Era pemerintahan Muhammad Ali Jinnah ditandai dengan perjuangan politik yang gigih untuk mewujudkan pemisahan India dan pembentukan negara Pakistan, dan juga diwarnai dengan kekerasan antar-etnis yang mengakibatkan pindahnya jutaan orang dari kedua pihak ke wilayah baru yang akan dibentuk. Keputusan untuk memisahkan wilayah India oleh para pemimpin politik di India pada saat itu didorong oleh perbedaan agama, yaitu Hindu dan Islam, dan ketidaksepakatan yang mendalam antara keduanya mengenai bentuk pemerintahan yang baru. Perjuangan Muhammad Ali Jinnah dan keinginannya untuk menciptakan negara terpisah bagi umat Muslim di India memengaruhi arah dan perkembangan politik di Asia Selatan secara signifikan. Visinya ini membawa dampak besar pada peta politik, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun pencapaian negara terpisah untuk umat Muslim memecah India menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan, dengan separuh penduduk Muslim memilih pindah ke Pakistan, proses itu tidak berlangsung tanpa pertumpahan darah dan kekerasan. Namun, visi Muhammad Ali Jinnah dan perjuangannya untuk menciptakan negara terpisah bagi umat Muslim di India menjadi peristiwa penting di wilayah tersebut dan tetap menjadi momen penting dalam sejarah Asia Selatan.

4. KESIMPULAN

Artikel ini memberikan gambaran tentang sejarah dan perkembangan Islam di Pakistan serta peran penting Muhammad Ali Jinnah dalam menciptakan negara Muslim modern yang demokratis dan pluralistik. Pembentukan Pakistan pada tahun 1947 dianggap sebagai sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam karena memberikan harapan dan inspirasi kepada kaum Muslim di seluruh dunia,

bahwa demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia dapat diterapkan dalam konsep negara yang berbasis Islam. Pada saat yang sama, pembentukan Pakistan juga memperlihatkan bahwa keberadaan sebuah negara berbasis agama tidak selalu menjamin kebebasan dan kesetaraan antara individu yang memiliki agama yang berbeda. Muhammad Ali Jinnah, sebagai pendiri Pakistan, merupakan pemimpin politik yang visioner dan mencoba memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan pluralisme dalam membangun negara baru yang berdasarkan agama. Dalam pidatonya, Jinnah menekankan pentingnya kebebasan beragama, perlindungan hak-hak minoritas, dan menciptakan negara yang merdeka dan modern. Meskipun Muhammad Ali Jinnah meninggal tidak lama setelah pembentukan Pakistan, ide-idenya tentang pembaharuan sosial dan politik terus berpengaruh dalam sejarah Pakistan sebagai negara yang pluralistik dan demokratis. Namun, seiring berjalannya waktu, peran agama dalam politik Pakistan semakin ditingkatkan, dan seringkali menjadi faktor penting yang memengaruhi kebijakan dan tindakan politik di negara tersebut. Artikel ini relevan bagi siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman tentang Islam di Pakistan dan proses perjuangan menciptakan negara baru yang berlandaskan nilai-nilai agama dan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. (2014). Nasionalisme Dan Pembentukan Negara Islam Pakistan. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 1–12.
- Akhter, Z. (2016). India–Pakistan relations: Efficacy of culture. *Millennial Asia*, 7(2). <https://doi.org/10.1177/0976399616655042>
- Al Mujahid, S. (1996). *innah's Vision of Pakistan*. TNI. <https://www.tni.org/en/article/jinnahs-vision-of-pakistan>
- Alhaddad, B. A. (2022). Muhamad Iqbal Dalam Kontribusi Pemikiran Dan Pembaharuan Islam di India-Pakistan. *Al-Tadabbur : Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama*, 08(01).
- Anooshahr, A. (2021). The Ghaznavid Empire of India. *Indian Economic and Social History Review*, 58(4). <https://doi.org/10.1177/00194646211041162>
- Asriyah. (2017). Perkembangan Islam di Pakistan. *Jurnal Rihlah*, 5(2).
- Ayunda, M. K., & Aria, R. D. (2017). Konflik India dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir Beserta Dampaknya (1947-1970). *Risalah*, 4(6).
- Briskey, M. (2022). The Foundations of Pakistan's Strategic Culture Fears of an Irredentist India, Muslim Identity Martial Race, and Political Realism. *Journal of Advanced Military Studies*, 2022. <https://doi.org/10.21140/mcu.2022SIstratcul008>
- Das, T. K. (2020). India and Pakistan Conflict: A Way towards Resolution. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3508975>
- Eaton, R. M. (2021). The Ghurid Conquest of North India, 1192– 1206. In *India in the Persianate Age*. <https://doi.org/10.1525/9780520974234-009>
- Hamka, Z. (2016). Muhammad Ali Jinnah dan Ide Pembaharuannya. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(2).
- Haq, A. D., & Hasaruddin. (2022). Kemunculan Islam Di Pakistan Dan Pemikiran Politik Muhammad Ali Jinnah. *Shoutika*, 2(2), 31–43. <https://doi.org/10.46870/jkpi.v2i2.333>
- Hasan, N. (2021). *Sejarah Berdirinya Negara Pakistan; Negara Lahirnya Beragam Pemikiran Keagamaan*. Harakatuna. <https://www.harakatuna.com/sejarah-berdirinya-negara-pakistan-negara-lahirnya-beragam-pemikiran-keagamaan.html>

- Hussain, R. (2015). *Pakistan and the Emergence of Muslim Majority States in India*. Oxford University Press.
- Inayati, A., Santalia, I., & Wahyuddin, G. (2022). Sejarah Islam Di Pakistan, Ide Pembaharuan Dan Perjuangan Muhammad Ali Jinnah. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 635–644.
- Ischak, S. N. (2019). Pembentukan Negara Islam Pakistan: Tinjauan Historis Peran Ali Jinnah. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 15(2). <https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.04>
- Isra Sarwar, Muhammad Shamshad, & Farooq Arshad. (2022). Crisis of Identity in 20th Century: The Case of the Sikhs in India. *PERENNIAL JOURNAL OF HISTORY*, 3(2). <https://doi.org/10.52700/pjh.v3i2.123>
- Jan, F. N. (2022). *At 75, Pakistan has moved far from the secular and democratic vision of its founder, Mohammad Ali Jinnah*. The Conversation. <https://theconversation.com/at-75-pakistan-has-moved-far-from-the-secular-and-democratic-vision-of-its-founder-mohammad-ali-jinnah-187238>
- Jauhari, A. (2012). India-Pakistan relations: International implications. *Asian Social Science*, 9(1). <https://doi.org/10.5539/ass.v9n1p42>
- Kumar, D. (2017). Impact of Arabs and Turks attacks on India. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, 5(7). <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v5.i7.2017.2115>
- Lautemann, E. (2009). Sources: Conflict Between India and Pakistan: An Encyclopedia. *Reference & User Services Quarterly*, 48(4). <https://doi.org/10.5860/rusq.48n4.403>
- Mohomed, C. (2014). "Islam" as the national identity for the formation of Pakistan: the political thought of Muhammad Iqbal and Abu'l 'Ala Mawdudi. *História (São Paulo)*, 33(1). <https://doi.org/10.1590/s0101-90742014000100015>
- Naveed, D. M., & Ali, D. S. (2022). Quaid-e- Azam Muhammad Ali Jinnah and Fine Arts. *DARYAFT*, 14(01). <https://doi.org/10.52015/daryaft.v14i01.212>
- Nursyamsi, Dedi, & Ibnu Rusydi. (2022). Upaya Legislasi Qanun Syari'ah Di India Dan Pakistan. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1). <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.1>
- Paracha, N. F. (2015). *Proyek ideologi Pakistan: Sebuah sejarah*. DAWN. <https://www.dawn.com/news/1197368>
- Philippon, A. (2021). Islam in Pakistan: A History, by Muhammad Qasim Zaman. *Comparative Islamic Studies*, 14(1–2). <https://doi.org/10.1558/cis.20056>
- Phillips, S. (2023). *Why was British India Partitioned in 1947? Considering the role of Muhammad Ali Jinnah*. History.Ox.Ac.Uk. <https://www.history.ox.ac.uk/why-was-british-india-partitioned-in-1947-considering-the-role-of-muhammad-ali-0>
- Press Release. (2023). *National Assembly of Pakistan*. Directorate General of Media.
- Priatna, G. (2017). Analisis Berdirinya Negara Islam Pakistan Dalam Perkembangan Sejarah Islam Di Indonesia. *Jurnal Dewantara*, 3(01).
- Qulkarni, S. (2019). Peran Partai Liga Muslim India Dalam Berdirinya Pakistan Sebagai Negara Islam Tahun 1937-1947. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Şahbaz, D. (2020). The Two Nations Theory and It's Role In The Establishment of Pakistan. *Academic Journal of History and Idea*, 7(1).
- Sahgal, Neha, Evans, J., Monique, A., Starr, K. J., & Manolo, C. (2021). *Religious freedom, discrimination and communal relations*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/religious-freedom-discrimination-and-communal-relations/>
- Shabbir, G. (2022). The Charismatic Leadership of Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah: His Vision and Constitutionalism. *PAKISTAN LANGUAGES AND HUMANITIES REVIEW*, 6(1).

- [https://doi.org/10.47205/plhr.2022\(6-i\)14](https://doi.org/10.47205/plhr.2022(6-i)14)
- Sulaiman, H. (2022). M Muhammad Ali Jinnah's Struggle In The Formation Of The Pakistan State. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora)*, 6(2).
<https://doi.org/10.36526/santhet.v6i2.2162>
- Team. (2015). *Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah*. "Story of Pakistan".
<https://storyofpakistan.com/muhammad-ali-jinnah/>
- Wazir, A. K. (2021). *The legacy of Jinnah in Indian politics*. The News.
<https://www.thenews.com.pk/print/919625-the-legacy-of-jinnah-in-indian-politics>
- Wulandari, F. (2021). Islam dan Demokrasi di Pakistan. *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 2(1). <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7882>
- Zamzami, F. (2023). *India dan Mimpi Buruk Ali Jinnah*. <https://www.republika.id/posts/44251/india-dan-mimpi-buruk-ali-jinnah>
- Zawawi, M. (2022). *Muhammad bin Qasim, Pembuka Jalan Pembebasan India*. NarasiPost.Com.
<https://narasipost.com/syiar/05/2022/muhammad-bin-qasim-pembuka-jalan-pembebasan-india/>
- Zia, A. S. (2022). Pakistan's Heuristic Her-story Via Lahore. *Journal of International Women's Studies*, 24(5).